

Dampak Pandemi COVID-19 dan Kebijakan *Work From Home* Terhadap Masyarakat Miskin dan Perempuan di Pedesaan

Lutfi Apreliana Megasari ¹, , Siti Mas'udah ^{1*}, , dan Priyono Tri Febrianto ², 

¹ Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, 60115, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia

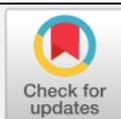
² Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Trunojoyo Madura, 69162, Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, Indonesia

* Korespondensi: siti.masudah@fisip.unair.ac.id

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:

Artikel Hasil Penelitian



Sitasi Cantuman:

Megasari, L. A., Mas'udah, S. & Febrianto, P. T. (2021). *The Impact of the COVID-19 Pandemic and Work From Home Policy on Poor Communities and Women in Rural Area*. *Society*, 9(2), 522-538.

DOI: [10.33019/society.v9i2.285](https://doi.org/10.33019/society.v9i2.285)

Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society

OPEN  ACCESS



Artikel dengan akses terbuka.

Lisensi: Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)

ABSTRAK

Wabah COVID-19 telah membawa banyak efek mendalam pada sektor ekonomi di seluruh dunia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan oleh COVID-19. Dengan mempertimbangkan masyarakat Indonesia kelas bawah, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan mengumpulkan 274 responden. Data diperoleh dari wawancara kuesioner dengan perempuan miskin di pedesaan Jawa Timur. Sumber data dipilih dengan menggunakan teknik random sampling. Studi literatur dilakukan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi di Indonesia telah menimbulkan dampak yang luar biasa pada sektor sosial ekonomi masyarakat dan perempuan dari kelas bawah di pedesaan. Mereka menderita kerugian besar mulai dari berkurangnya pendapatan hingga kehilangan pekerjaan. Penelitian ini juga menyoroti kebijakan *Work From Home* (WFH) yang tidak bisa diterapkan pada masyarakat kelas bawah karena banyak yang terkena PHK, dan beberapa karyawan yang tetap bekerja berisiko terpapar penyakit. Begitu pula dengan kebijakan pandemi COVID-19 dan *Work From Home* (WFH) menimbulkan beberapa masalah bagi perempuan. Tanggung jawab rumah tangga perempuan terbukti meningkat di masa pandemi. Perempuan yang melakukan WFH tampaknya disibukkan dengan dua peran, pertama sebagai pekerja, kedua sebagai ibu rumah tangga yang membantu rumah tangga. Secara khusus, itu berarti perempuan dituntut untuk melakukan pekerjaan domestik dan publik. Oleh karena itu, kesadaran gender diperlukan untuk

Dikirim: 12 Januari, 2021;
Diterima: 29 Juni, 2021;
Dipublikasi: 31 Desember, 2021;

meminimalisir kerugian perempuan dalam hal ini.

Kata Kunci: Dampak Sosial Ekonomi; Kelas Bawah; Kemiskinan; Miskin; Pandemi COVID-19; Perempuan

1. Pendahuluan

COVID-19 yang mewabah di hampir semua negara secara global berdampak signifikan pada semua faktor. Pandemi yang berkembang pesat ini mendorong negara-negara untuk menerapkan mitigasi terhadap kejatuhan ekonomi di seluruh dunia ([Atkeson, 2020](#)). Sebagian besar negara merasakan dampak ekonomi yang parah. Secara global, aktivitas ekonomi tersendat akibat pandemi ini. Pemberlakuan penguncian area karantina berdampak pada banyak orang yang tidak dapat bekerja secara normal. Selain itu, pandemi itu sendiri berdampak buruk pada perusahaan skala besar dan sektor informal.

Virus ini telah membawa banyak kerugian pada sektor ekonomi, termasuk kematian dan penyakit, hilangnya pendapatan, waktu, dan biaya pengobatan ([Fernandes, 2020](#); [Hall et al., 2020](#); [McKibbin & Roshen, 2020](#)). Berbagai sektor ekonomi lumpuh, yang menyebabkan banyak karyawan di-PHK. Saat ini, tingkat pengangguran yang tinggi menjadi masalah bagi banyak negara di dunia. Selain itu, COVID-19 tidak hanya menurunkan sistem kesehatan tetapi juga menyerang sektor lain. Naiknya angka kematian di negara berkembang mencerminkan kondisi ekonomi negara yang memburuk.

[Baker et al. \(2020\)](#) menjelaskan bahwa pandemi COVID-19 memicu ketidakpastian seperti penutupan sementara pasar tradisional, percepatan pemulihan ekonomi, kelangsungan usaha, pembentukan bisnis baru, dan penanaman modal. Negara maju seperti Amerika Serikat juga kewalahan berjuang melawan COVID-19. Virus yang berasal dari China itu juga melumpuhkan negara itu sendiri, sehingga berdampak pada ketahanan ekonomi negara setempat. Di sisi lain, meskipun pengiriman logistik masih dilakukan sebagai bagian dari kegiatan ekonomi, banyak perusahaan telah mengurangi skala produksi dan terpaksa melepaskan pekerjaan. Akibatnya banyak pekerja yang menganggur, terutama pekerja jasa hotel dan pariwisata.

COVID-19 memicu kekhawatiran krisis ekonomi dan resesi di berbagai negara maju karena keuntungan ekonomi tidak lagi didasarkan pada minyak murah, sementara penghematan bahan bakar tidak mungkin ([Nicola et al., 2020](#); [Ozili & Arun, 2020](#); [Sułkowski, 2020](#)). Transaksi ekonomi antar negara perlahan-lahan semakin memburuk setiap harinya. Situasi pandemi ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun negara di dunia ini yang lebih unggul. Negara-negara makmur dengan sistem ekonomi raksasanya akhirnya mengalami masalah yang sama.

[Alvarez et al. \(2020\)](#) menyatakan bahwa banyak negara mengabaikan konsekuensi ekonomi jangka panjang dari *lockdown* dan fokus pada perawatan medis. Ini berarti bahwa berbagai negara mengesampingkan urusan ekonomi. Mereka beranggapan bahwa risiko penularan virus ini akan jauh lebih tinggi jika sektor ekonomi terus diupayakan. Oleh karena itu, menerapkan *lockdown* secara ketat tampaknya menjadi pilihan terbaik bagi negara-negara di seluruh dunia. Studi lain juga menyebutkan bahwa pandemi COVID-19 menimbulkan guncangan yang dapat menyebabkan kerugian *output* lebih besar dari efisien, terutama dominasi penurunan pasokan ([Guerrieri et al., 2020](#); [Inoue & Todo, 2020](#); [Toda, 2020](#)).

Penutupan massal sekolah dan tempat kerja berdampak pada pembatasan perempuan dalam angkatan kerja dan peluang ekonomi, terutama tantangan keuangan dan ketidakpastian bagi pekerja perempuan ([Alon et al., 2020](#); [Wenham et al., 2020](#); [Fuchs-Schelnund, 2020](#)). Pada

akhirnya, pemutusan hubungan kerja membawa kejutan keuangan keluarga. Untuk alasan keamanan kesehatan, menerapkan protokol kebiasaan baru menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Tantangan finansial yang dialami masyarakat merupakan representasi dari dampak destruktif virus tersebut.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh [Baldwin & Mauro \(2020\)](#), negara yang terjangkit COVID-19 adalah negara G-7 plus China. Kendala utama terletak pada gangguan permintaan karena penurunan makro ekonomi agregat, keterlambatan konsumen dalam pembelian, dan penundaan investasi dari perusahaan. Negara-negara industri mengalami dampak mengingat ekspor-impor turun tajam di tengah disrupsi COVID-19. Apalagi, perusahaan raksasa yang berperan penting sebagai pilar ekonomi mau tidak mau rentan terkena dampak yang sama. Selain itu, krisis juga mengancam negara-negara berkembang secara tidak proporsional. Virus ini juga secara khusus membawa dampak bencana bagi masyarakat kelas bawah. Studi sebelumnya mengungkapkan bahwa pandemi ini telah menyebabkan pembatasan perjalanan dan pembatalan tiket, pengangguran yang lebih tinggi, dan beberapa orang tidak dapat bekerja dari rumah, termasuk orang tanpa gelar ([Coibion et al., 2020](#); [Hevia & Neumeyer, 2020](#); [Tesso, 2020](#)). Hal-hal tersebut melekat pada negara berkembang yang perekonomiannya masih bertumpu pada sumber daya alam dan manusia yang tidak memadai.

Sebuah studi oleh [Van Lancker & Parolin \(2020\)](#) mengeksplorasi bahwa penutupan sekolah yang berkepanjangan terkait dengan pandemi COVID-19 cenderung berdampak negatif pada masyarakat dan memiliki konsekuensi besar bagi anak-anak di rumah tangga berpenghasilan rendah lebih lanjut, itu akan memperburuk ketidaksetaraan. Di komunitas miskin, menutup sekolah dan mengubah sistem pembelajaran menjadi metode *online* tidak efektif. Selain kurangnya fasilitas, anak-anak miskin tidak dapat mengakses sistem pembelajaran *online* karena biaya rendah. Wabah ini mengintensifkan ketimpangan yang terjadi di negara berkembang. Penelitian lain juga menyimpulkan bahwa banyak kerugian yang diakibatkan oleh COVID-19, seperti perselisihan pasar tenaga kerja, perubahan konsumsi masyarakat, kemiskinan nonmoneter, dan pendidikan ([Ahmed et al., 2020](#); [Sumner et al., 2020](#)).

Banyak pihak yang beranggapan bahwa masyarakat kelas bawah memegang peranan penting dalam penanganan COVID-19. Masyarakat miskin umumnya mengasosiasikan dengan gaya hidup yang tidak sehat untuk menyebarkan virus dengan cepat. Sebaliknya, virus ini mencemari sistem kekebalan tubuh karena mobilitas tinggi, yang biasa dialami masyarakat kelas atas. Di sisi lain, kemiskinan dipandang mengurangi kepatuhan terhadap protokol COVID-19 ([Wright et al., 2020](#)). Kemiskinan juga dipandang sebagai penghambat upaya pemulihan penanggulangan COVID-19 karena anggaran pengadaan fasilitas kesehatan harus dibagi untuk bantuan sosial bagi masyarakat miskin.

Selain menerapkan prosedur kebiasaan hidup sehat, Indonesia juga menghadapi situasi yang sama, tidak memberlakukan lockdown dan pembatasan wilayah. Negara menerapkan protokol kebiasaan baru, yakni *physical distancing*, *work from home*, dan karantina mandiri. Protokol-protokol tersebut dijalankan dengan ketat, mengingat berbagai sektor ekonomi lumpuh. Di sisi lain, Indonesia semakin mempersiapkan pembangunan ekonomi, dan pemerintah menilai *lockdown* tidak perlu dilakukan karena hanya akan memperburuk ketahanan ekonomi. Studi sebelumnya menyebutkan bahwa ekonomi Pakistan diproyeksikan turun sekitar 3,3% sejak 2019 oleh Asian Development Bank, sementara Nigeria memiliki 24% dari total penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, sehingga dari atas dapat diidentifikasi bahwa *lockdown* COVID-19 sulit bagi negara berkembang ([Buheji et al., 2020](#); [Loayza & Pennings, 2020](#); [Mamun & Ullah, 2020](#)).

COVID-19 kemungkinan akan menyerang negara-negara yang fasilitas kesehatannya tidak memadai (Anser *et al.*, 2020). Diduga, fasilitas kesehatan yang tidak memadai dapat menghambat pengendalian pandemi. Temuan Anser tidak sepenuhnya benar karena bencana ini masih menjebak negara maju dengan fasilitas kesehatan yang terorganisir. China, Italia, Amerika Serikat, Finlandia, dan UEA telah mengembangkan paparan COVID-19 yang masif.

Virus ini pada akhirnya bisa menjadi bencana karena menyebabkan kematian dan memberikan dampak negatif. Pada dasarnya, bencana alam menimbulkan dampak ekonomi jangka pendek dan jangka panjang (Cavallo *et al.*, 2013). Seperti halnya wabah COVID-19, keadaan ini juga akan meninggalkan dampak ekonomi jangka pendek dan jangka panjang. Untuk sementara, hampir semua sektor ekonomi akan mengalami kerusakan parah, sementara secara permanen, dampaknya kemungkinan besar akan berdampak pada kerja sama ekonomi antar negara secara signifikan.

Sejumlah negara telah berusaha keras untuk mengatasi COVID-19 segera. Pasca bencana pandemi, upaya pemulihan stabilitas ekonomi secara bertahap dilakukan dengan mengendalikan pendapatan dan kerugian yang ditimbulkan, membuat sistem ekonomi lebih terbuka, melengkapi sistem keuangan, dan merampingkan pemerintahan (Toya & Skidmore, 2007). Banyak negara secara tak terduga mengalami penurunan ekonomi, dan pada kenyataannya, para pengusaha berada di ambang kebangkrutan. Sehingga berdampak pada pekerja. Perusahaan perhotelan dan bisnis jasa pariwisata bangkrut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemulihan ekonomi belum menunjukkan perbaikan. Selain itu, disrupsi pandemi juga menyerang aktivitas sosial dan ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan dan kerentanan masyarakat (Adeagbo *et al.*, 2016).

Menurut Kreimer *et al.* (2003), studi tersebut mengeksplorasi bahwa bencana berdampak negatif terhadap perekonomian, yaitu perlambatan ekonomi global, yang mempengaruhi transaksi perdagangan. Kelesuan ekonomi akibat bencana tersebut menyebabkan ketidakmampuan menjalankan transaksi ekonomi antar individu maupun dalam skala global. Wabah COVID-19 berdampak pada aktivitas penjualan di sektor perdagangan karena kemerosotan ekonomi menyebabkan penurunan nilai tukar uang. Selain itu, juga terjerat dalam masyarakat kelas bawah.

Sebagai alternatif, sebuah studi yang dilakukan oleh Fothergill (2003) menemukan bahwa penanggulangan bencana mudah dilakukan pada masyarakat miskin. Pemberi bantuan pemerintah dengan mudah mengenali kelas bawah dengan ekonomi terburuk. Sementara itu, tidak semua masyarakat kelas bawah tercakup oleh bantuan pemerintah. Dalam beberapa kasus, orang-orang yang berasal dari kelas menengah yang bisa hancur secara finansial mungkin lebih kecil kemungkinannya untuk mendapatkan bantuan karena asumsi latar belakang status sosial mereka. Selain itu, terjadinya bencana juga mengungkapkan ketimpangan masyarakat berpenghasilan rendah karena mereka tidak berdaya secara sosial, politik, dan ekonomi (Motesharrei *et al.*, 2014).

Penelitian tentang COVID-19 telah dimulai oleh berbagai pakar dan akademisi, terutama yang berasal dari kedokteran, sains, dan teknologi. Makalah ini berfokus pada masyarakat kelas bawah yang terkena dampak COVID-19. Banyak penelitian telah ditemukan tentang bencana dan kemiskinan di beberapa penelitian lain. Tulisan ini menyajikan potret kemiskinan di tengah wabah COVID-19 karena memiliki efek multikompleks yang tidak dapat dikaitkan dengan satu aspek kemiskinan.

2. Metodologi Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji dampak COVID-19 terhadap masyarakat kelas bawah dan perempuan di pedesaan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis data deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dari 274 keluarga berpenghasilan rendah yang tinggal di Jawa Timur, Indonesia. Sumber data diperoleh dengan teknik *random sampling*. Studi literatur dilakukan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian.

Selain itu, wawancara dilakukan dengan keluarga yang mengalami kerusakan luar biasa akibat pandemi COVID-19. Studi ini berfokus pada responden yang kehilangan pekerjaan atau diberhentikan untuk mengungkapkan kondisi sosial ekonomi keluarga berpenghasilan rendah dan dampak pandemi pada mereka dan perempuan.

Data dari wawancara mendalam diklasifikasikan dan dikategorikan sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian, data dianalisis, diinterpretasikan, dan didiskusikan dengan studi banding yang relevan dengan penelitian. Data yang dikumpulkan dari responden kemudian disajikan dalam bentuk tabel.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pandemi COVID-19 membawa banyak efek pada populasi global. Termasuk Indonesia, wabah tersebut juga memiliki pengaruh yang signifikan di berbagai sektor. Penelitian ini menemukan bahwa COVID-19 mempengaruhi kondisi sosial ekonomi penduduk Indonesia, terutama kelas bawah. Munculnya pandemi ini mengubah aspek ekonomi menjadi situasi berbagai kalangan di Indonesia mengalami dampak yang cukup parah. Akibat wabah ini, beberapa sektor bahkan terpaksa menutup ladang pendapatannya. Wabah ini memaksa pengusaha untuk menutup usahanya di sektor pariwisata dan perhotelan, sehingga banyak pekerja yang diberhentikan. Akibatnya, kondisi ekonomi keluarga berantakan.

3.1. Dampak COVID-19 terhadap Perekonomian Masyarakat Kelas Bawah di Pedesaan

Seperti yang ditunjukkan pada **Tabel 1**, responden mengalami ketidakstabilan ekonomi. Lebih dari separuh responden setuju bahwa wabah ini telah membawa kondisi ekonomi keluarga ke dalam krisis. Beberapa di antaranya mengalami pemotongan gaji hingga anggota keluarga yang di-PHK. Faktor utama penyebab gangguan ini adalah karena aktivitas ekonomi berangsur-angsur memburuk. Sementara itu, sebagian responden lainnya mengatakan perekonomian berjalan dengan baik. Kondisi ini terjadi pada pegawai tetap instansi pemerintah atau pada perusahaan skala besar. Seorang karyawan yang bekerja di lingkungan seperti itu tidak mengalami penurunan kondisi ekonomi. Berbeda dengan pekerja di sektor lain yang ekonominya di ambang kehancuran.

Tabel 1. Dampak ekonomi terhadap masyarakat kelas bawah di pedesaan

Dampak Ekonomi akibat COVID-19 pada Rumah Tangga	Frekuensi	Persentase (%)
Keuangan tidak stabil	182	66,42
Keuangan stabil	92	33,58
Total	274	100

Penelitian sebelumnya menyebutkan dua dampak ekonomi dari bencana: dampak langsung dan tidak langsung (Carrera *et al.*, 2015). Dampak langsungnya bisa berupa wilayah

atau negara yang secara langsung mengalami ketidakstabilan ekonomi. Banyak orang mengalami guncangan okupasi, yaitu kehilangan pekerjaan pada akhirnya, yang menjadi beban ekonomi bagi negara. Pemulihan pasca bencana yang membutuhkan dana cukup besar juga memperparah kondisi ini. Selain itu, bencana juga memiliki dampak tidak langsung. Hal ini berkaitan dengan sektor lain, seperti sosial politik suatu negara.

Sama halnya dengan wabah COVID-19 yang dialami Indonesia, pandemi ini berdampak langsung dan tidak langsung. Secara ekonomi, COVID-19 telah membawa depresi ekonomi ke negara itu. Terlihat bahwa pariwisata yang selama ini menjadi sumber utama perekonomian Indonesia kini terpaksa ditutup untuk mencegah penularan penyakit yang lebih luas. Apalagi di tahun 2020 ini, Indonesia sudah menyiapkan wisata premium di berbagai tempat wisata. Hal ini tentu membuat Indonesia kehilangan aset dan peluang ekonominya.

Kejadian bencana memperlihatkan ketimpangan masyarakat berpenghasilan rendah karena mereka tidak memiliki kekuatan sosial, politik, dan ekonomi (Motesharrei *et al.*, 2014). Orang miskin semakin terpuruk karena bencana. Jika hal ini tidak tercakup oleh bantuan sosial, kerentanan ini akan membuat rumah tangga miskin semakin kecil kemungkinannya untuk bangkit dari bencana. Di sisi lain, meski bencana menghancurkan perekonomian seluruh masyarakat, ketimpangan sosial akan semakin terbuka ketika terjadi bencana. Masyarakat miskin yang tidak memiliki aset dan modal semakin parah, terutama bagi para pekerja yang hanya mengandalkan pendapatan dari satu pekerjaan.

Tabel 2. Kerugian ekonomi masyarakat miskin pedesaan di tengah pandemi COVID-19

Pilihan	Frekuensi	Persentase (%)
Pendapatan berkurang	118	43,07
Penghentian pekerjaan	151	55,11
Berdebat/bertengkar dengan rekan kerja lebih sering	5	1,82
Total	274	100

Sebagaimana dijelaskan pada **Tabel 2**, perekonomian masyarakat kelas bawah benar-benar dipertaruhkan di masa pandemi COVID-19. Masyarakat kelas bawah merasakan dampak sosial dan ekonomi yang begitu kuat. Banyak dari mereka mengatakan bahwa pendapatan mereka berkurang. Di sektor perdagangan, banyak pedagang mengeluhkan penurunan omzet. Apalagi pemerintah menutup pasar tradisional, sehingga pedagang mengeluhkan minimnya pendapatan.

Selain itu, pekerja pabrik di Indonesia menghadapi ketidakpastian status dalam pekerjaan mereka. Banyak dari mereka diberhentikan tanpa menerima kompensasi apa pun. Bahkan ketika terpaksa mengambil cuti sementara dari pekerjaannya, perusahaan memilih untuk tidak membayar mereka karena kegiatan produksi telah dihentikan. Para pekerja menghadapi krisis ekonomi selama kondisi itu, khususnya dengan menikah dan memiliki anak. Pekerja tidak memiliki penghasilan, tetapi di sisi lain, kehidupan tetap berjalan.

Selain pekerja produksi, orang-orang yang bekerja di sektor perhotelan dan pariwisata juga merasakan dampak yang sama. Karena pembatasan sosial, banyak pelaku bisnis perhotelan melakukan penutupan hotel. Akibatnya, pekerja hotel diberhentikan tanpa gaji. Situasi tersebut berdampak pada pekerja dan kedua belah pihak, pekerja, dan karyawan. Mereka berdua berada dalam situasi yang sama merugikan. Pekerja di lokasi wisata juga menderita. Sebagian

besar objek wisata di Indonesia diberlakukan penutupan, yang membuat pekerja tidak menerima penghasilannya.

Berdasarkan penelitian Villanueva (2011), perubahan iklim merupakan bencana yang dekat dengan masyarakat kelas bawah, yang menyebabkan ketidakpastian dan kerentanan. Biasanya bencana alam di Indonesia berkaitan dengan alam, seperti cuaca buruk yang menyebabkan sektor pertanian mengalami penurunan pendapatan. Namun selama pandemi COVID-19, kerentanan masyarakat kelas bawah dapat menyebabkan ketidakpastian ekonomi. Masa depan pekerja yang mengalami PHK sementara digantung dalam kerawanan. Mereka menghadapi ketidakpastian waktu yang tepat untuk kembali bekerja. Masyarakat kelas bawah mengkhawatirkan pemutusan hubungan kerja. Selain rentan terhadap pemutusan hubungan kerja, mereka juga harus melamar pekerjaan lain jika terpaksa harus menerima cuti tanpa bayaran atau pemecatan sepihak.

Pencapaian pembangunan juga tidak terlepas dari kegiatan ekonomi perempuan. Studi sebelumnya menyatakan bahwa bencana merusak rencana pencapaian pembangunan, terutama di negara berkembang di mana kelompok rentan dicengkeram oleh perangkat kemiskinan pascabencana (Yokomatsu *et al.*, 2014). Dalam penelitian ini, perempuan kelas bawah juga mengalami dampak yang luar biasa akibat pandemi COVID-19. Perempuan juga mengalami beberapa kendala akibat kebijakan *Work From Home*.

3.2. Kebijakan *Work From Home* untuk Masyarakat Miskin dan Perempuan Pedesaan

Pemerintah menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (*Work From Home*) bagi pekerja di Indonesia. Kebijakan ini tidak serta merta membuat masyarakat merasa mudah dalam bekerja. Berbagai pekerjaan tidak bisa dilakukan di rumah, sehingga beberapa perusahaan menutup perusahaannya. Hal ini membuat masyarakat kehilangan pekerjaan sehingga masyarakat miskin lebih rentan.

Meski kebijakan bekerja dari rumah dianggap sebagai solusi untuk mencegah wabah, sebagian besar masyarakat Indonesia yang merupakan kalangan menengah ke bawah merasa tidak enak. Aturan bekerja dari rumah yang diterapkan oleh pemerintah tidak bisa dibuat dengan baik oleh masyarakat. Kebijakan ini tentu menguntungkan kalangan atas karena pekerjaan yang dilakukan di kantor dapat dilakukan di rumah dengan menggunakan akses internet. Pada saat yang sama, pekerjaan kelas bawah tidak dapat dilakukan dengan bekerja dari rumah, sehingga mereka tidak dapat memenuhi panggilan pemerintah. Beberapa jenis pekerjaan seperti pedagang kaki lima, pekerja pabrik, pekerja swalayan, tukang ojek *online*, dan kurir barang adalah pekerjaan kelas bawah yang tidak bisa dilakukan di rumah. Kelas bawah adalah warga yang paling rentan terpapar risiko COVID-19.

Kemiskinan di Indonesia merupakan tantangan besar bagi negara dan warganya. McMahan (2007) menyatakan bahwa kemiskinan merupakan hambatan bagi negara untuk bangkit setelah bencana karena uang yang digunakan untuk melakukan pembangunan tertunda untuk membantu masyarakat yang terkena dampak, terutama masyarakat miskin. Dalam penanganan COVID-19, pemerintah Indonesia mengeluarkan anggaran yang sangat besar. Anggaran ini digunakan untuk fasilitas kesehatan dan warga rentan. Pandemi ini melumpuhkan berbagai sektor ekonomi, sehingga keberadaan masyarakat miskin menjadi perhatian besar pemerintah.

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa orang miskin membangun rumah di daerah yang tidak aman, selain membuat mereka lebih rentan, menambah atau menciptakan masalah lain dalam perencanaan bencana jangka panjang, evakuasi, dan studi risiko (Ferdinand *et al.*, 2012). Dalam bencana terkait kesehatan, masyarakat miskin dituduh menghasilkan lanskap kota yang

tidak teratur akibat urbanisasi (Rashid *et al.*, 2013). Terkait risiko terpapar COVID-19, sebagian warga miskin menempati rumah yang tidak layak huni. Masyarakat miskin yang tinggal di kawasan kumuh menjadi perhatian besar karena kawasan kumuh memiliki risiko tinggi penyebaran penyakit. Selain itu, warga yang tinggal di kawasan kumuh belum memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan, sehingga kemiskinan mudah dikaitkan dengan kondisi yang memperparah bencana. Studi sebelumnya menyatakan bahwa gagasan kerentanan sangat menghubungkan kemiskinan dengan penyebab bencana (Akter & Mallick, 2013). Orang miskin adalah orang yang rentan jika terjadi bencana.

Dunford & Li (2011) menjelaskan bahwa kemiskinan berkaitan erat dengan kerentanan pada masyarakat miskin karena beberapa alasan, antara lain tempat tinggal, kondisi tempat tinggal, penelantaran anak akibat migrasi orang tua, dan ketergantungan pada sumber daya alam. Studi sebelumnya menyebutkan bahwa tsunami yang melanda Asia pada tahun 2008 menyebabkan sektor kelautan tidak dapat diakses, meskipun penduduk pesisir bergantung pada sumber daya alam (Gaillard *et al.*, 2008). Sementara itu, kerentanan yang dialami masyarakat miskin di Indonesia merupakan persoalan yang kompleks. Kondisi seperti itu membuat masyarakat miskin sulit menghadapi bencana dan memulihkan kehidupan mereka. De Silva & Kawasaki (2018) menyatakan bahwa kemiskinan dalam menghadapi bencana sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan, dan ada pula yang bergantung pada alam.

Selain terkena dampak langsung dari bencana alam, masyarakat miskin juga merasakan dampak jangka panjang dari pekerjaannya, yang biasa disebut dengan "*poverty trap*", yaitu situasi pemulihan tidak akan terjadi tanpa bantuan dari luar (Carter *et al.*, 2007). Dalam menghadapi pandemi COVID-19, masyarakat kelas bawah di Indonesia tidak memiliki kekuatan untuk bergantung pada bantuan eksternal dari pemerintah atau donor. Bantuan yang diberikan sangat bermanfaat bagi warga masyarakat kelas bawah karena tanpa bantuan mereka tidak dapat menjamin kehidupan mereka akan berjalan dengan baik.

Jika masyarakat kelas atas masih memiliki akses permodalan di bank, lain halnya dengan masyarakat kelas bawah yang tidak memiliki jaminan kesehatan untuk mengamankan lembaga keuangan formal. Orang miskin juga tidak memiliki akses ke kredit formal (Parvin & Shaw, 2013). Di masa pandemi seperti ini, masyarakat kelas bawah seringkali terjebak dalam jebakan kemiskinan. Perangkap ini adalah rentenir yang menjadi sumber pinjaman bagi orang miskin. Keberadaan rentenir selama ini dianggap bukan solusi bagi masyarakat miskin untuk keluar dari kesulitan ekonomi, melainkan mencekik mereka dengan sistem bunga tinggi. Dalam kondisi sulit, tidak ada pilihan lain bagi warga kelas bawah untuk bertahan hidup. Meski masyarakat kelas bawah mendapatkan bantuan dari pemerintah, keberadaan rentenir merupakan hal yang lumrah di masyarakat, sehingga warga kelas bawah tidak mudah keluar dari lingkaran.

Mallick *et al.* (2011) menjelaskan bahwa kelompok berpenghasilan rendah di Bangladesh tidak menerima bantuan bencana yang cukup karena mereka merasa malu untuk mengantri. Akhirnya, mereka menjual properti mereka atau mengambil kredit dari sumber lain. Studi lain menunjukkan bahwa program bantuan perumahan mengalami masalah lain seperti ketidaksesuaian budaya dan iklim, lokasi yang buruk, masalah sosial, dan kurangnya kapasitas organisasi (Johnson, 2007). Berbeda dengan Indonesia, penduduk yang tidak menerima bantuan sosial berada di atas garis kemiskinan tetapi memiliki kehidupan yang bergeser di bawah garis kemiskinan. Warga seperti ini adalah masyarakat kelas menengah yang belum pernah menerima bantuan sosial dan tidak terdaftar sebagai penerima manfaat. Kondisi ini ternyata menjadi masalah di Indonesia karena penghuni kelas ini pada saat pandemi COVID-19

mengalami pergeseran posisi. Akhirnya jumlah masyarakat kelas bawah bertambah, tetapi bantuan sosial tidak sampai ke lapisan-lapisan tersebut.

Tabel 3. Dampak kebijakan *Work From Home* bagi perempuan miskin pedesaan

Pilihan	Frekuensi	Persentase (%)
Perempuan menerima lebih banyak manfaat	46	16,62
Perempuan dirugikan karena pekerjaan rumah tangga yang lebih berat	114	41,69
Perempuan seharusnya berpartisipasi baik di sektor publik maupun domestik	109	39,84
Suami menjadi lebih pemarah baru-baru ini (hubungan kasar)	5	1,85
Total	274	100

Dari **Tabel 3** terlihat bahwa pandemi COVID-19 dan kebijakan work-at-home menimbulkan masalah bagi perempuan. Beban kerja perempuan terbukti meningkat di masa pandemi COVID-19. Ini berarti perempuan dituntut untuk melakukan tanggung jawab domestik dan publik secara bersamaan. Selama bekerja di rumah, perempuan disibukkan untuk menyeimbangkan dua hal ini, pertama, tugasnya sebagai pekerja, kemudian sebagai ibu yang membantu rumah tangga.

Dalam budaya keluarga patriarki, perempuan yang sudah menikah terus melakukan segregasi dan pemaknaan gender sebagai ibu rumah tangga yang berkewajiban melaksanakan sebagian besar tanggung jawab domestik (termasuk pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan) (Kan, 2008). Akibatnya, perempuan “memikul” beban ganda pekerjaan dan tugas keluarga. Beban ganda dapat didefinisikan sebagai situasi dimana perempuan memiliki beban kerja yang lebih besar daripada laki-laki. Pembagian kerja di rumah berdasarkan gender mengharuskan perempuan untuk melakukan sebagian besar pekerjaan perawatan tidak berbayar di bidang rumah tangga sementara laki-laki tidak mengambil tanggung jawab yang lebih besar untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan tidak berbayar pada tingkat yang sama. Sebelumnya, beberapa penelitian di masyarakat agraris, di mana budaya patriarki sangat dipertahankan, menggambarkan bahwa intensitas tanggung jawab domestik yang terkait dengan pekerjaan perawatan yang tidak dibayar merupakan penghalang utama bagi kesetaraan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja formal. Apalagi perempuan terus mengalami dominasi laki-laki di ranah domestik (rumah tangga) (Debnath, 2015).

Menurut (Väänänen *et al.*, 2004) penelitian menemukan bahwa perempuan menghabiskan lebih dari 10 jam kerja daripada pekerjaan pria. Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa meskipun jam kerja perempuan dan laki-laki di sektor publik sama, kerja perempuan dua kali lebih lama karena beban ganda peran domestik dan publik yang dipegang sekaligus. Hal ini menunjukkan bahwa beban kerja perempuan jauh lebih besar daripada laki-laki karena harus melakukan peran ganda, terutama perempuan yang hidup dalam lingkungan subordinat. Perempuan menanggung beban ganda menjadi ibu rumah tangga.

Dominasi laki-laki dalam keluarga membuat perempuan memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk pekerjaan rumah tangga dan tugas pengasuhan. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa pekerjaan rumah tangga diklasifikasikan sebagai bagian dari tanggung jawab perempuan dalam beban kerja yang sangat tinggi dan tidak dibayar (Sankaran, 2013).

Peran ibu rumah tangga ini dianggap tidak dibayar karena dianggap sebagai tugas rumah tangga. [Natalier \(2003\)](#) mengemukakan bahwa gender muncul sebagai praktik dan identitas holistik dalam rumah tangga. Perempuan akan selalu dibebani dengan banyak pekerjaan rumah selama suami dan istri tidak merundingkan praktik dan identitas gender.

Meskipun pekerjaan rumah tangga erat kaitannya dengan perempuan sebagai istri yang mengalami beban ganda, penelitian di Jepang mengungkapkan bahwa suami yang memikul tanggung jawab rumah tangga tidak memadai dan tidak diselesaikan dengan baik. [Ueda \(2005\)](#) mengungkapkan bahwa meskipun suami ikut berinisiatif dalam pekerjaan rumah tangga, hal tersebut masih dianggap kurang memadai. Selain itu, perempuan cenderung melakukan tugas rumah tangga dan pengasuhan karena masalah ketidakpercayaan pada suami tentang melakukan pekerjaan rumah tangga. Kasus serupa terjadi terutama pada semua perempuan karena kebiasaan terbiasa dengan pendidikan patriarki yang sudah melekat. Dalam teori pemerataan, perempuan bertanggung jawab atas segala tugas pekerjaan rumah tangga oleh istri karena doktrin tersebut menyatakan bahwa suami berperan sebagai pencari nafkah dan memegang kekuasaan atas istri atau perempuan, apalagi jika istri tidak ikut dalam pasar tenaga kerja ([Carriero & Todesco, 2017](#)).

Di sisi lain, meskipun laki-laki juga berinisiatif melakukan pekerjaan rumah, tetap saja perempuan tetap melakukan sebagian besar pekerjaan rumah tangga, mengasuh anak, dan kewajiban masyarakat ([Kan et al., 2011](#)). Penelitian lebih lanjut menyoroti dampak ketidakseimbangan antara peran sebagai suami dan istri pada perempuan bekerja dan berkeluarga. Meskipun pria berkeinginan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga dalam keluarga patriarki, mereka masih berpikir bahwa istri harus berperilaku dan patuh kepada suaminya. [Álvarez & Miles \(2006\)](#) menemukan bahwa ketika perempuan berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja dan mengurangi pekerjaan rumah tangga, laki-laki memutuskan untuk mengurangi waktu mereka untuk pekerjaan rumah tangga.

Eksklusi laki-laki di ranah domestik tidak terlepas dari sistem sosial dan budaya dalam konteks patriarki. Perempuan disubordinasikan dan dieksploitasi untuk menjalani semua pekerjaan rumah tangga. Ini menggambarkan manifestasi dan pelembagaan dominasi dan perluasan laki-laki atas perempuan dalam masyarakat mengejar harmoni rumah tangga ([Veltman, 2004](#)). Mayoritas keluarga percaya bahwa keharmonisan sebuah keluarga tergantung pada perilaku perempuan.

Namun, meskipun perempuan mendapat kesempatan untuk menggantikan dogma tersebut, pada kenyataannya budaya patriarki masih bertahan. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh [Luke et al. \(2014\)](#), perempuan pekerja cenderung memiliki kesempatan untuk mengembalikan budaya dan norma patriarki dalam keluarga. Pekerjaan rumah tangga dapat dengan mudah dinegosiasikan, khususnya ketika gaji istri melebihi pendapatan suami. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa ketergantungan perempuan pada suami menyebabkan disparitas gender di ranah domestik ([Sullivan & Gershuny 2013](#)).

Sebuah studi oleh [Noonan et al. \(2007\)](#) mengeksplorasi kesetaraan beban kerja domestik dalam rumah tangga karir ganda dapat ditempuh dengan mengelola pembagian kerja secara adil untuk istri dan suami, yang dapat disesuaikan berdasarkan timeline mereka. Sebaliknya, ketika perempuan dan laki-laki memiliki durasi waktu kerja yang sama, setiap tanggung jawab rumah tangga menjadi kewajiban perempuan.

Sebagai negara berkembang yang terletak di *ring of fire*, Indonesia dikenal sebagai negara yang rawan bencana. Bersama negara-negara di Asia Tenggara dan Pasifik, Indonesia telah mengalami berbagai bencana dan menerima dampak yang parah selama bertahun-tahun. Berdasarkan [Nhu et al. \(2011\)](#), letak geografis Vietnam merupakan negara berkembang dengan

wilayah yang rawan bencana. Dari fakta tersebut dapat diimplikasikan bahwa negara ini rentan terhadap kemiskinan pada saat munculnya bencana. Kemiskinan diyakini menjadi penghalang serius untuk mencapai pembangunan sosial-ekonomi di tengah munculnya bencana. Hal serupa juga terjadi di Indonesia, di mana mitigasi bencana membutuhkan upaya besar untuk mengembangkan kembali permasalahan tersebut.

Pada tahun 2020, Indonesia sedang mempersiapkan strategi untuk kemajuan ekonomi. Banyak sektor perekonomian Indonesia yang dibangun secara masif. Berbagai sektor pariwisata sedang digenjut dalam skala kecil maupun besar. Pemerintah pada tahun 2020 juga menyiapkan wisata premium dan event internasional. Di sisi lain, dikembangkan oleh masyarakat, pariwisata lokal menjadi andalan Indonesia untuk mempromosikan pariwisata dunia. Obyek-obyek wisata yang dikelola oleh penduduk setempat terbukti memiliki pengaruh yang sangat baik bagi kawasan tersebut. Tidak hanya ditargetkan sebagai branding untuk negara. Namun, pariwisata lokal telah menjadi magnet ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Namun, karena munculnya COVID-19, sektor ini memburuk secara signifikan. Penutupan lokasi wisata berdampak cukup serius. Pedagang yang berjualan di lokasi wisata akhirnya menderita kerugian besar.

3.3. Bantuan sosial pemerintah untuk perempuan di pedesaan yang terkena dampak pandemi COVID-19

Bank Dunia mengajukan konsep “*poverty vulnerability*” pada tahun 2000, mengacu pada beberapa hal seperti panen yang buruk, pengangguran, penyakit serius, atau bencana alam yang parah (Xu *et al.*, 2017). Senada dengan Sawada & Takasaki (2017), masyarakat miskin sangat rentan terhadap bencana alam, dan merupakan hambatan utama untuk mengurangi kemiskinan dan memfasilitasi pembangunan ekonomi. Ini adalah paradoks yang rumit ketika negara mencoba mengatasi kemiskinan, tetapi pada saat yang sama, orang miskin dipandang sebagai penghalang pengentasan kemiskinan. Anggaran negara yang semula ditujukan untuk pengembangan sektor lain digunakan untuk pengentasan kemiskinan melalui bantuan sosial. Sebagaimana terlihat pada Tabel 4, bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah Indonesia menuai tanggapan yang berbeda dari berbagai kalangan.

Tabel 4. Bantuan sosial pemerintah untuk masyarakat miskin pedesaan di tengah pandemi COVID-19

Pilihan	Frekuensi	Persentase (%)
Menyelamatkan rumah tangga rentan	118	42,95
Itu seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah	81	29,51
Distribusi yang salah sasaran	75	27,54
Total	274	100

Pada Tabel 4 terlihat bantuan sosial yang dikeluarkan pemerintah untuk penanganan COVID-19 mendapat tanggapan yang beragam. Selama ini, pemerintah telah memberikan berbagai jenis bantuan, baik dalam bentuk bantuan tunai bersyarat, program keringanan kredit, tarif dasar listrik hingga penyaluran sembako. Namun sayangnya, bantuan tersebut hanya mencakup sebagian kecil masyarakat saja.

Bantuan sosial bagi masyarakat kelas bawah diperlukan untuk pengentasan kemiskinan dan dimaksudkan untuk melindungi mereka. Jika kelas bawah tidak mendapatkan bantuan, kehidupan mereka akan memburuk. Di sisi lain, masalah ini merupakan bagian dari tanggung jawab negara terhadap rakyat. Namun tetap saja bansos yang diberikan mendapat tanggapan yang beragam, yang menyatakan bahwa penyaluran bansos mungkin tidak tepat sasaran. Adanya ketimpangan sosial di Indonesia menjadikan bansos menjadi isu sensitif bagi masyarakat Indonesia. Bantuan sosial yang diberikan tidak melalui prosedur seleksi penerima yang ketat sehingga menimbulkan kecemburuan sosial.

Selain itu, bansos untuk kelas bawah mengalami beberapa kendala akibat fluktuasi kriteria yang tidak ditentukan dan kelas menengah pada indikator kemiskinan. Bencana mempengaruhi kasus ini, mengubah kelas menengah menjadi kelas bawah sehingga berdampak pada pertumbuhan masyarakat miskin.

Menurut [Onuoha \(2009\)](#), di Nigeria terjadi bencana seperti peledakan pipa yang terkait sebagai akibat dari kemiskinan akibat keserakahan orang miskin. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan dipandang sebagai bentuk negatif yang memperparah terjadinya bencana. Demikian pula, kemiskinan dipandang sebagai kendala dalam penanggulangan bencana alam di Indonesia, termasuk COVID-19. Setelah pandemi cepat muncul, pemerintah Indonesia memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah menghimbau masyarakat bawah untuk membiasakan pola hidup sehat untuk mengurangi penyebaran infeksi. Dalam hal ini, kemiskinan merupakan episentrum kebalikannya untuk mempercepat epidemi.

Di sisi lain, kelas atas bukan satu-satunya yang rentan terhadap virus. Sebaliknya, itu menimbulkan dampak yang luar biasa di semua kelas sosial ekonomi. Sektor pendidikan, jasa, manufaktur, dan perdagangan jatuh. Namun, industri makanan cepat saji dan perkapalan telah menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Berbagai profesi pekerjaan mengalami situasi yang sama.

[Davies et al. \(2009\)](#) mengungkapkan bahwa kelas bawah adalah yang paling rentan terhadap bencana karena ketidakmampuan mereka untuk mengatasi dampak terkait karena kemampuan beradaptasi yang rendah. Dampak COVID-19 menjadi tantangan yang cukup besar bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Kelas bawah tergolong masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan. Mereka bisa lebih tidak berdaya jika ada kejadian mengejutkan yang menyiksa mereka. Selain tidak mampu mengakses modal, masyarakat kelas bawah juga tidak memiliki posisi tawar dan keamanan sosial, ekonomi, dan politik.

Senada dengan [Winsemius et al. \(2018\)](#), kerentanan masyarakat miskin disebabkan oleh rendahnya akses terhadap simpanan, pinjaman, dan perlindungan sosial. Orang miskin tidak akan pernah memiliki akses ke bank untuk meminjam modal karena mereka tidak memiliki aset yang dapat dijadikan agunan. Selain itu, tabungan mereka tidak cukup atau bahkan tidak ada sama sekali. Di masa pandemi COVID-19, tidak ada yang bisa diandalkan oleh masyarakat kelas bawah, selain mengharapkan bantuan sosial dari pemerintah. Di sisi lain, sektor swasta tidak berpartisipasi dalam mitigasi risiko bencana, termasuk masyarakat miskin. Ini secara strategis memotong pasarnya. Kemudian jaring pengaman yang dibiayai oleh masyarakat tidak dapat diakses oleh masyarakat miskin karena tidak adanya pasar ([Christopher et al., 2001](#)).

Masyarakat kelas bawah yang berprofesi sebagai petani dan buruh dapat tetap bertahan hidup dengan menerapkan strategi bertahan hidup dengan mengandalkan kerja sebagai kepemilikan sendiri. Lain halnya dengan masyarakat miskin yang bekerja sebagai buruh yang di-PHK. Situasi ini membawa guncangan ekonomi bagi rumah tangga dan kesulitan mendapatkan modal dan pinjaman.

Studi yang dilakukan di Vietnam menunjukkan bahwa rumah tangga pedesaan di Vietnam lima kali lebih miskin daripada penduduk perkotaan. Sebaliknya, kemiskinan di pedesaan menurun lebih lambat, sehingga sulit untuk pulih dari bencana, dan tidak ada investasi di infrastruktur pedesaan (Lohmann & Lechtenfeld, 2015). Hal ini juga terjadi di Indonesia, di mana masyarakat miskin pedesaan tidak memiliki akses yang cukup untuk pulih dari bencana.

Masyarakat yang mengalami perubahan selama pandemi ini menyimpulkan bahwa semua bagian dan kelas mengalami keterpurukan sosial ekonomi. Jatuhnya perekonomian nasional disebabkan oleh penghentian produk dari perusahaan di seluruh Indonesia dan pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran. Di sisi lain, kelas bawah menghadapi perjuangan ekonomi yang tidak biasa. Namun, tidak ada yang bisa diselesaikan karena kurangnya akses adaptasi yang baik.

4. Kesimpulan

Dampak luar biasa dari wabah COVID-19 telah mempengaruhi semua lapisan masyarakat. Bagi masyarakat kelas bawah, pandemi ini membawa perekonomian yang tidak stabil. Akibat keadaan tersebut, masyarakat miskin mengalami goncangan ekonomi dan ketidakstabilan kesejahteraan. Meskipun sebagian besar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang gaya hidup sehat dan transformasi digital, masyarakat miskin memiliki sedikit kesempatan untuk mencapai hal-hal ini.

Minimnya akses dan pengetahuan membuat masyarakat miskin rentan dan semakin terpuruk karena wabah ini. Di sisi lain, tidak semua masyarakat kelas bawah tercakup sepenuhnya oleh bantuan sosial meskipun mereka berjuang dengan keterpurukan ekonomi. Beberapa menerima surat pemutusan hubungan kerja, sementara yang lain bekerja di tengah ancaman pandemi COVID-19. Selain itu, perempuan menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan dan menanggung beban ganda pasca kebijakan *Work from Home* karena kurangnya kesadaran laki-laki akan keadilan dan kesetaraan gender.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah berkenan bekerjasama selama penelitian ini.

6. Pernyataan *Conflicts of Interest*

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

Daftar Pustaka

- Adeagbo, A., Daramola, A., Carim-Sanni, A., Akujobi, C., & Ukpong, C. (2016). Effects of natural disasters on social and economic well being: A study in Nigeria. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 17, 1–12. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2016.03.006>
- Ahmed, F., Ahmed, N., Pissarides, C., & Stiglitz, J. (2020). Why inequality could spread COVID-19. *The Lancet Public Health*, 5(5), e240. [https://doi.org/10.1016/s2468-2667\(20\)30085-2](https://doi.org/10.1016/s2468-2667(20)30085-2)
- Akter, S., & Mallick, B. (2013). The poverty–vulnerability–resilience nexus: Evidence from Bangladesh. *Ecological Economics*, 96, 114–124. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2013.10.008>

- Alon, T., Doepke, M., Olmstead-Rumsey, J., & Tertilt, M. (2020). The Impact of COVID-19 on Gender Equality. *Journal of Chemical Information and Modeling*. <https://doi.org/10.3386/w26947>
- Álvarez, B., & Miles, D. (2006). Husbands' housework time: Does wives' paid employment make a difference? *Investigaciones Economicas*, xxx(1), 5-31. Retrieved from <https://www.redalyc.org/pdf/173/17330101.pdf>
- Alvarez, F., Argente, D., & Lippi, F. (2020). A Simple Planning Problem for COVID-19 Lockdown. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3569911>
- Anser, M. K., Yousaf, Z., Khan, M. A., Nassani, A. A., Alotaibi, S. M., Qazi Abro, M. M., . . . Zaman, K. (2020). Does communicable diseases (including COVID-19) may increase global poverty risk? A cloud on the horizon. *Environmental Research*, 187, 109668. <https://doi.org/10.1016/j.envres.2020.109668>
- Atkeson, A. G. (2020). What will be the economic impact of COVID-19 in the US? Rough estimates of disease scenarios. *Research Department Staff Reports (Federal Reserve Bank of Minneapolis)*.
- Baker, S., Bloom, N., Davis, S., & Terry, S. (2020). Covid-induced economic uncertainty. *National Bureau of Economic Research*. <https://doi.org/10.3386/w26983>
- Baldwin, R., & Mauro, B. W. di. (2020). Economics in the time of COVID-19. In *Economics in the Time of COVID-19*.
- Buheji, M., da Costa Cunha, K., Beka, G., Mavrić, B., Leandro do Carmo de Souza, Y., Souza da Costa Silva, S., Hanafi, M., & Chetia Yein, T. (2020). The extent of COVID-19 pandemic socio-economic impact on global poverty. A global integrative multidisciplinary review. *American Journal of Economics*. <https://doi.org/10.5923/j.economics.20201004.02>
- Carrera, L., Standardi, G., Bosello, F., & Mysiak, J. (2015). Assessing direct and indirect economic impacts of a flood event through the integration of spatial and computable general equilibrium modelling. *Environmental Modelling and Software*. <https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2014.09.016>
- Carriero, R., & Todesco, L. (2017). The interplay between equity and gender ideology in perceived housework fairness: Evidence from an experimental vignette design. *Sociological Inquiry*. <https://doi.org/10.1111/soin.12162>
- Carter, M. R., Little, P. D., Mogues, T., & Negatu, W. (2007). Poverty Traps and natural disasters in Ethiopia and Honduras. *World Development*. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2006.09.010>
- Cavallo, E., Galiani, S., Noy, I., & Pantano, J. (2013). Catastrophic natural disasters and economic growth. *Review of Economics and Statistics*. https://doi.org/10.1162/REST_a_00413
- Christopher, I., Liljelund, A., & Mitchell, J. (2001). Re-framing risk: The changing context of disaster mitigation and preparedness. *Disasters*. <https://doi.org/10.1111/1467-7717.00171>
- Coibion, O., Gorodnichenko, Y., & Weber, M. (2020). Labor markets during the COVID-19 crisis: A preliminary view. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3574736>
- Davies, M., Oswald, K., & Mitchell, T. (2009). Climate change adaptation , disaster risk reduction and social protection. *Change*.
- De Silva, M. M. G. T., & Kawasaki, A. (2018). Socioeconomic vulnerability to disaster risk: A case study of flood and drought impact in a rural Sri Lankan community. *Ecological Economics*. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2018.05.010>
- Debnath, S. (2015). The impact of household structure on female autonomy in developing

- countries. *Journal of Development Studies*. <https://doi.org/10.1080/00220388.2014.983909>
- Dunford, M., & Li, L. (2011). Earthquake reconstruction in Wenchuan: Assessing the state overall plan and addressing the “forgotten phase.” *Applied Geography*. <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2011.01.001>
- Ferdinand, I., O'Brien, G., O'Keefe, P., & Jayawickrama, J. (2012). The double bind of poverty and community disaster risk reduction: A case study from the Caribbean. *International Journal of Disaster Risk Reduction*. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2012.09.003>
- Fernandes, N. (2020). Economic effects of coronavirus outbreak (COVID-19) on the world economy. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3557504>
- Fothergill, A. (2003). The stigma of charity: Gender, class, and disaster assistance. *Sociological Quarterly*. <https://doi.org/10.1111/j.1533-8525.2003.tb00530.x>
- Fuchs-Schelnund, N. (2020). *Gender structure of paper submissions at the Review of Economic Studies during COVID-19: First evidence*. Retrieved from <https://www.wiwi.uni-frankfurt.de/profs/fuchs/staff/fuchs/paper/FemaleSubmissionsCovid19.pdf>
- Gaillard, J. C., Clavé, E., & Kelman, I. (2008). Wave of peace? Tsunami disaster diplomacy in Aceh, Indonesia. *Geoforum*. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2007.10.010>
- Guerrieri, V., Lorenzoni, G., Straub, L., & Werning, I. (2020). Macroeconomic implications of COVID-19: Can negative supply shocks cause demand shortages? *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3570096>
- Hall, R. E., Jones, C. I., & Kleneow, P. J. (2020). Trading off consumption and COVID-19 deaths. *Quarterly Review*. <https://doi.org/10.21034/qr.4211>
- Hevia, C., & Neumeyer, A. (2020). A conceptual framework for analyzing the economic impact of COVID-19 and its policy implications. *COVID19 Policy Document Series*.
- Inoue, H., & Todo, Y. (2020). The propagation of the economic impact through supply chains: The case of a mega-city lockdown against the spread of COVID-19. In *arXiv*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3564898>
- Johnson, C. (2007). Strategic planning for post-disaster temporary housing. *Disasters*. <https://doi.org/10.1111/j.1467-7717.2007.01018.x>
- Kan, M. Y. (2008). Does gender trump money? Housework hours of husbands and wives in Britain. *Work, Employment and Society*. <https://doi.org/10.1177/0950017007087416>
- Kan, M. Y., Sullivan, O., & Gershuny, J. (2011). Gender convergence in domestic work: Discerning the effects of interactional and institutional barriers from large-scale data. *Sociology*. <https://doi.org/10.1177/0038038510394014>
- Kreimer, A., Arnold, M., Carlin, A., & World Bank, the (WB). (2003). Building safer cities, the future of disaster risk. In *Disaster Risk Management Series*.
- Loayza, N., & Pennings, S. M. (2020). Macroeconomic policy in the time of COVID-19: A primer for developing countries. *World Bank Research and Policy Briefs*.
- Lohmann, S., & Lechtenfeld, T. (2015). The effect of drought on health outcomes and health expenditures in rural Vietnam. *World Development*. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.03.003>
- Luke, N., Xu, H., & Thampi, B. V. (2014). Husbands' participation in housework and child care in India. *Journal of Marriage and Family*. <https://doi.org/10.1111/jomf.12108>
- Mallick, B., Rubayet Rahaman, K., & Vogt, J. (2011). Social vulnerability analysis for sustainable disaster mitigation planning in coastal Bangladesh. *Disaster Prevention and Management: An International Journal*. <https://doi.org/10.1108/09653561111141682>
- Mamun, M. A., & Ullah, I. (2020). COVID-19 suicides in Pakistan, dying off not COVID-19 fear but poverty? – The forthcoming economic challenges for a developing country. In *Brain*,

- Behavior, and Immunity.* <https://doi.org/10.1016/j.bbi.2020.05.028>
- McKibbin, W., & Roshen, F. (2020). The global macroeconomic impacts of COVID-19. In *Brookings Institute*.
- McMahon, M. M. (2007). Disasters and poverty. In *Disaster Management and Response.* <https://doi.org/10.1016/j.dmr.2007.09.001>
- Motesharrei, S., Rivas, J., & Kalnay, E. (2014). Human and nature dynamics (HANDY): Modeling inequality and use of resources in the collapse or sustainability of societies. *Ecological Economics*, 101, 90–102. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2014.02.014>
- Natalier, K. (2003). “I’m not his wife”: Doing gender and doing housework in the absence of women. *Journal of Sociology.* <https://doi.org/10.1177/00048690030393003>
- Nhu, O.L., Thuy, N.T.T., Wilderspin, I., & Coulier, M. (2011). A preliminary analysis of flood and storm disaster data in VietNam. *Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction.*
- Nicola, M., Alsafi, Z., Sohrabi, C., Kerwan, A., Al-Jabir, A., Iosifidis, C., Agha, M., & Agha, R. (2020). The socio-economic implications of the coronavirus pandemic (COVID-19): A review. In *International Journal of Surgery.* <https://doi.org/10.1016/j.ijssu.2020.04.018>
- Noonan, M. C., Estes, S. B., & Glass, J. L. (2007). Do workplace flexibility policies influence time spent in domestic labor? *Journal of Family Issues.* <https://doi.org/10.1177/0192513X06292703>
- Onuoha, F. C. (2009). Why the poor pay with their lives: Oil pipeline vandalism, fires and human security in Nigeria. *Disasters.* <https://doi.org/10.1111/j.1467-7717.2008.01079.x>
- Ozili, P. K., & Arun, T. (2020). Spillover of COVID-19: Impact on the global economy. *SSRN Electronic Journal.* <https://doi.org/10.2139/ssrn.3562570>
- Parvin, G. A., & Shaw, R. (2013). Microfinance institutions and a coastal community’s disaster risk reduction, response, and recovery process: A case study of Hatiya, Bangladesh. *Disasters.* <https://doi.org/10.1111/j.1467-7717.2012.01292.x>
- Rashid, S. F., Gani, S., & Sarker, M. (2013). *Urban Poverty, Climate Change and Health Risks for Slum Dwellers in Bangladesh.* https://doi.org/10.1007/978-4-431-54249-0_4
- Sankaran, K. (2013). Domestic work, unpaid work and wage rates. In *Economic and Political Weekly.*
- Sawada, Y., & Takasaki, Y. (2017). Natural disaster, poverty, and development: An introduction. *World Development.* <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.12.035>
- Sułkowski, Ł. (2020). COVID-19 pandemic; recession, virtual revolution leading to de-globalization? *Journal of Intercultural Management.* <https://doi.org/10.2478/joim-2020-0029>
- Sullivan, O., & Gershuny, J. (2013). Domestic outsourcing and multitasking: How much do they really contribute? *Social Science Research.* <https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2013.05.004>
- Sumner, A., Hoy, C., & Ortiz-Juarez, E. (2020). Estimates of the impact of COVID-19 on global poverty. *UNU WIDER Working Paper 2020/43.*
- Tesso, G. (2020). *The economics of COVID-19: Economic Growth, unemployment and the challenge to progress out of poverty in Ethiopia.* Retrieved from academia.edu.
- Toda, A. A. (2020). Susceptible-Infected-Recovered (SIR) dynamics of COVID-19 and economic impact. In *arXiv.*
- Toya, H., & Skidmore, M. (2007). Economic development and the impacts of natural disasters. *Economics Letters.* <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2006.06.020>
- Ueda, A. (2005). Intrafamily time allocation of housework: Evidence from Japan. *Journal of the Japanese and International Economies.* <https://doi.org/10.1016/j.jjie.2003.12.002>

- Väänänen, A., Kevin, M. V., Ala-Mursula, L., Pentti, J., Kivimäki, M., & Vahtera, J. (2004). The double burden of and negative spillover between paid and domestic work: Associations with health among men and women. *Women and Health*. https://doi.org/10.1300/J013v40n03_01
- Van Lancker, W., & Parolin, Z. (2020). COVID-19, school closures, and child poverty: a social crisis in the making. In *The Lancet Public Health*. [https://doi.org/10.1016/S2468-2667\(20\)30084-0](https://doi.org/10.1016/S2468-2667(20)30084-0)
- Veltman, A. (2004). The Sisyphean Torture of housework: Simone de Beauvoir and inequitable divisions of domestic work in marriage. *Hypatia: A Journal of Feminist Philosophy*. <https://doi.org/10.2979/hyp.2004.19.3.121>
- Villanueva, P. S. (2011). Learning to ADAPT: Monitoring and evaluation approaches in climate change adaptation and disaster risk reduction – challenges , gaps and ways forward. *SCR Discussion Paper 9*.
- Wenham, C., Smith, J., & Morgan, R. (2020). COVID-19: the gendered impacts of the outbreak. In *The Lancet*. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30526-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30526-2)
- Winsemius, H. C., Jongman, B., Veldkamp, T. I. E., Hallegatte, S., Bangalore, M., & Ward, P. J. (2018). Disaster risk, climate change, and poverty: Assessing the global exposure of poor people to floods and droughts. *Environment and Development Economics*. <https://doi.org/10.1017/S1355770X17000444>
- Wright, A. L., Sonin, K., Driscoll, J., & Wilson, J. (2020). Poverty and economic dislocation reduce compliance with COVID-19 shelter-in-place protocols. *Journal of Economic Behavior and Organization*. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2020.10.008>
- Xu, D., Peng, L., Liu, S., Su, C., Wang, X., & Chen, T. (2017). Influences of migrant work income on the poverty vulnerability disaster threatened area: A case study of the Three Gorges Reservoir area, China. *International Journal of Disaster Risk Reduction*. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2017.03.001>
- Yokomatsu, M., Wada, H., Ishiwata, H., Kono, T., & Wakigawa, K. (2014). An economic growth model for disaster risk reduction in developing countries. *2014 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC)*. <https://doi.org/10.1109/smc.2014.69741>

Tentang Penulis

1. **Lutfi Apreliana Megasari** adalah mahasiswa lulusan program sarjana Sosiologi, Universitas Airlangga, Indonesia. Skripsinya adalah tentang pertanian dan budaya pedesaan. Ia menyelesaikan studinya pada tahun 2019.
E-Mail: lutfiaprilmegasari@gmail.com
2. **Siti Mas'udah** memperoleh gelar Doktor Ilmu Sosial dari Universitas Airlangga, Indonesia, pada tahun 2020. Penulis adalah dosen pada Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Indonesia. Ia mengajar beberapa mata kuliah di Program Studi Sosiologi: sosiologi keluarga, sosiologi gender, sosiologi hukum, gender dan hak asasi manusia, sosiologi perilaku menyimpang, dan sistem sosial budaya Indonesia. Ia

juga menjabat sebagai pemimpin redaksi jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik yang terindeks oleh Emerging Source Citation Index (ESCI), Clarivate Analytics, Web of Science.

E-Mail: siti.masudah@fisip.unair.ac.id

- Priyono Tri Febrianto** memperoleh gelar Magister dari Universitas Gadjah Mada, Indonesia, pada tahun 2004. Penulis adalah dosen pada Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia.

E-Mail: priyono.febrianto@trunojoyo.ac.id